

ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN/KOTA DI BENGKULU

Titik Harliza
Merri Anitasari
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu
merfattah@gmail.com

ABSTRAK

Titik Harliza, Merri Anitasari: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh DAK, DAU dan PAD terhadap belanja daerah di Bengkulu. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pooled Data Regression dengan model common effect. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan dan signifikan terhadap belanja daerah di Bengkulu.

ABSTRACT

Titik Harliza, Merri Anitasari: *The purpose of this study was to analyze the effect of DAK, DAU and PAD on regional expenditure in Bengkulu. Analysis tools used in this study is Pooled Data Regression with common effect model. The result shows that the variables of Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU) and District Original Income (PAD) have significant and positive effect on regional expenditure in Bengkulu.*

Key Words : *Special Allocation Fund (DAK), General Allocation Fund (DAU), District Original Income (PAD), Regional Expenditure, Pooled data regression*

PENDAHULUAN

Suatu negara dengan wilayah yang luas membutuhkan suatu sistem pemerintahan yang baik. Sistem ini sangat diperlukan setidaknya oleh dua hal: pertama sebagai alat untuk melaksanakan berbagai pelayanan publik di berbagai daerah. Kedua sebagai alat bagi masyarakat setempat untuk dapat berperan aktif dalam menentukan arah dan cara mengembangkan taraf hidupnya sendiri selaras dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam koridor kepentingan-kepentingan nasional. Untuk tujuan itu banyak yang harus dilakukan, salah satunya dengan desentralisasi, yaitu pelimpahan tanggung jawab fiskal, politik dan administrasi kebijakan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Di Indonesia, pelaksanaan desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, salah satunya untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical fiscal imbalance*) dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance*).

Dalam UU No.32 tahun 2004 dan UU No.33 tahun 2004 diamanatkan suatu kewenangan otonomi yaitu agar daerah melaksanakan pembangunan disegala bidang. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan proses yang memerlukan keterlibatan segenap unsur dan lapisan masyarakat, serta memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam meakukan pengelolaan keuangan daerah.

Salah satu aspek penting pelaksanaan otonomi daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). APBD merupakan kebijaksanaan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai pertimbangan lainnya dengan maksud agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi anggaran pendapatan belanja daerah mudah dilakukan. Pada sisi lain APBD dapat juga menjadi sarana bagi pihak tertentu untuk melihat atau mengetahui kemampuan daerah baik dari segi pendapatan maupun dari sisi belanja.

Fenomena umum yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintahan daerah di Indonesia dibidang keuangan daerah adalah relatif kecilnya peranan (kontribusi) PAD didalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dengan kata lain dari struktur APBD dapat dilihat seberapa besar kontribusi PAD terhadap penerimaan total daerah dan dari pos mana yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembangunan dan pendapatan daerah. Maka dari itu Pendapatan Asli Daerah merupakan pencerminan dari potensi ekonomi daerah, sehingga tidak berlebihan apabila pemerintah pusat menjadikan PAD sebagai kriteria dalam pemberian otonomi daerah.

Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah dan pemerintah daerah. Dana perimbangan terdiri dari : Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Dana perimbangan merupakan dana paling besar yang diterima dibandingkan Pendapatan Asli

Daerahnya (PAD) oleh karena itu daerah Kabupaten/Kota Bengkulu harus bisa mencari dan menggali potensi daerahnya dan sumber daya alamnya agar pendanaan pembangunan lebih terarah.

Mencermati fenomena yang terjadi tersebut menjadi pertanyaan bahwa bagaimana pengaruh masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap belanja daerah, maka masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu? Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu.

KAJIAN PUSTAKA

Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Menurut Koesoehatmadja (Sumaryadi,2005) pengertian desentralisasi berasal dari bahasa latin, de: lepas, dan *centrum*: pusat; desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 dijelaskan bahwa Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah merupakan suatu langkah awal menuju pembangunan ekonomi nasional yang lebih baik bagi masyarakat di daerah (Siswanto, 2008).

Pelaksanaan otonomi daerah mempunyai prinsip – prinsip yang dijelaskan dalam Penjelasan Umum UU No. 32 Tahun 2004 sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keragaman daerah.
2. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab.
3. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan otonomi daerah provinsi merupakan otonomi yang terbatas.
4. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan kontribusi negara sehingga tetap terjaga hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom dan karenanya dalam daerah kabupaten /kota tidak ada lagi wilayah administratif.
6. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas, maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
7. Pelaksanaan azas dekonsentrasi diletakkan pada daerah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administratif untuk melaksanakan kewenangan pemerintah tertentu yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah.
8. Pelaksanaan azas tugas perbantuan dimungkinkan, tidak hanya dari pemerintah kepada daerah, tetapi juga pemerintah dan daerah kepada desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana dan merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terdiri dari tiga komponen utama, yaitu unsur penerimaan, belanja rutin dan belanja pembangunan. Ketiga komponen itu meskipun disusun hampir secara bersamaan, akan tetapi proses penyusunannya berada di lembaga yang berbeda (Halim, 2002).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah di ubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 dan adanya perubahan kedua dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua , belanja dikelompokkan menjadi :

1. Belanja Langsung ialah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal.
2. Belanja Tidak Langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Terdiri dari belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah,

belanja bantuan sosial, dan belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Menurut Depkeu (2009), DAK merupakan salah satu jenis transfer dana perimbangan yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional dan menjadi urusan daerah.

Kebutuhan khusus alokasi DAK meliputi :

1. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah terpencil yang tidak mempunyai akses yang memadai ke daerah lain.
2. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah yang menampung transmigrasi.
3. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik yang terletak di daerah pesisir kepulauan dan tidak mempunyai prasarana dan sarana yang memadai.
4. Kebutuhan prasarana dan sarana fisik di daerah guna mengatasi dampak kerusakan lingkungan.
5. Pembangunan jalan, rumah sakit, irigasi dan air bersih.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Setiap daerah memperoleh besaran DAU yang tidak sama, karena harus dialokasikan atas dasar besar kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) dan alokasi dasar. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskal kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskal besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu komponen penerimaan / pendapatan daerah disamping dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saragih (2003), dalam Bangun (2009) menyatakan bahwa peningkatan PAD harus berdampak pada perekonomian daerah. Peningkatan PAD menunjukkan adanya peningkatan partisipasi publik terhadap jalannya pemerintahan didaerahnya. Salah satu tugas pemerintah daerah ialah meningkatkan kesejahteraan masyarakat memerlukan PAD sebagai bentuk kemandirian di era otonomi daerah. Adapun jenis-jenis pendapatan yang dapat diklasifikasi sebagai PAD kabupaten /kota adalah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari ketentuan di atas, jelas bahwa sumber keuangan daerah selain berasal dari pemberian pemerintah pusat, juga bersumber dari pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber keuangan tertentu yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah disebut Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian pemerintah daerah dituntut memiliki kemampuan untuk memperoleh sumber-sumber pendapatan yang asli guna membiayai sendiri penyelenggaraan urusan rumah tangganya. Oleh karena itu sumber-sumber PAD yang ada terus ditingkatkan penerimaannya secara maksimal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanasi asosiatif (*explanatory research*) yang menjelaskan pengaruh variabel bebas (*independent*) terhadap variabel terikat (*dependent*). Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu sebagai variabel terikat, sedangkan variabel bebasnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data *time series* selama 5 tahun yaitu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan oleh pihak lain yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain berupa dokumentasi dan arsip resmi. Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) atau publikasi lainnya, meliputi Data Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum,

Pendapatan Asli Daerah, dan Belanja Daerah yang diambil dari publikasi Buku Provinsi Bengkulu dalam Angka 2009-2013.

Data yang digunakan untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini sepenuhnya data sekunder. Data yang diperoleh merupakan data-data dari dokumen Badan Pusat Statistik. Data yang dibutuhkan adalah data Belanja Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif yaitu metode yang digunakan untuk menganalisis data yang berhubungan dengan masalah pengaruh Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah dengan cara perhitungan matematis dan angka-angka statistik. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi data panel (*Pooled Data Regression*) dengan bentuk persamaan :

$$BD_{it} = \beta_0i + \beta_1 DAK_{it} + \beta_2 DAU_{it} + \beta_3 PAD_{it} + \epsilon_{it}$$

HASIL PENELITIAN

Perkembangan DAK, DAU, dan PAD terhadap APBD Kabupaten /Kota di Bengkulu Dana Alokasi Khusus

Proporsi perkembangan Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Bengkulu dapat dilihat dalam tabel 1.

Tabel 1. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkulu menurut Sumbernya Tahun 2009-2013 dalam Ribuan Rupiah.

KABUPATEN /KOTA	Rasio DAK terhadap APBD (%DAK/APBD)					Rata-Rata (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bengkulu Selatan	6,63	4,55	3,96	4,02	3,75	4,58
Rejang Lebong	5,81	4,62	3,62	4,03	3,63	4,34
Bengkulu Utara	9,48	5,01	4,09	3,22	3,39	5,04
Kaur	8,10	6,02	5,05	5,61	6,04	6,16
Seluma	7,50	4,90	5,69	5,60	5,20	5,78
Muko-muko	6,84	4,60	4,40	4,35	5,34	5,11
Lebong	6,06	3,90	3,50	4,75	5,87	4,82
Kepahiang	7,59	4,05	4,15	3,60	5,11	4,90
Bengkulu Tengah	1,84	7,57	7,04	4,53	6,37	5,47
Kota Bengkulu	4,42	2,35	2,27	2,44	2,85	2,87

Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS.Data diolah

Tabel 1 menunjukkan rata-rata proporsi Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota di Bengkulu 5 tahun terakhir terbesar di Kabupaten Kaur dengan rata-rata 6,16 persen. Sementara itu Kabupaten Seluma menjadi daerah terbesar kedua yang memiliki rata-rata 5,78 persen dan rata-rata terendah dimiliki oleh Kota Bengkulu dengan rata-rata 2,87 persen, hal ini dikarenakan kegiatan khusus untuk sarana dan prasarana di Kota Bengkulu lebih sedikit jika dibandingkan dengan 9 daerah lainnya yang masih banyak membutuhkan dana untuk pembangunan daerahnya.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan Dana Alokasi Umum adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal keuangan antara pemerintah pusat dan ketimpangan horizontal antar pemerintah daerah karena ketidakmerataan sumber daya yang ada pada masing-masing daerah.

Tabel 2. Realisasi Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkulu menurut Sumbernya Tahun 2009-2013 dalam Ribuan Rupiah.

KABUPATEN /KOTA	Rasio DAU terhadap APBD (%DAU/APBD)					Rata-Rata (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bengkulu Selatan	35,97	36,07	33,90	36,05	35,85	35,57
Rejang Lebong	33,06	32,33	33,81	36,93	37,09	34,64
Bengkulu Utara	34,11	35,51	29,94	33,96	34,99	33,70
Kaur	33,87	34,64	34,51	44,00	35,42	36,49
Seluma	36,60	35,68	42,51	38,95	35,90	37,93
Muko-muko	31,05	33,49	35,68	36,81	35,47	34,50
Lebong	32,88	33,40	33,31	39,32	36,75	35,13
Kepahiang	28,31	30,86	32,48	38,31	37,47	33,49
Bengkulu Tengah	34,74	35,98	29,96	35,60	34,58	34,17
Kota Bengkulu	34,48	32,57	32,94	36,06	0,03	27,22

Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS.Data diolah

Tabel 2 memperlihatkan rata-rata rasio antara Dana Alokasi Umum dengan APBD dalam 5 tahun terakhir setiap Kabupaten/Kota di Bengkulu berbeda-beda. Rata-rata proporsi Dana Alokasi Umum terendah berada di Kota Bengkulu sebesar 27,22 persen. Hal ini dikarenakan pada tahun 2013 Kota Bengkulu mengalami penurunan yang sangat tinggi dari 36,06 persen menjadi 0,03 persen karena dalam Penjabaran Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bengkulu Tahun 2013 di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kota, terdapat anggaran yang sama sekali tidak digunakan senilai Rp Rp 343,7 juta. Sejatinya anggaran itu diperuntukkan guna mendukung Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir yakni pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Akibatnya, anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) tersebut terpaksa dikembalikan ke kas negara dan sama sekali tidak dapat digunakan lagi. Sedangkan rata-rata proporsi DAU tertinggi dimiliki Kabupaten Seluma sebesar 37,93 persen diikuti Kabupaten Kaur sebesar 36,49 persen.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dalam upaya menciptakan kemandirian daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi faktor yang sangat penting dimana PAD akan menjadi sumber dana dari daerah sendiri. Namun demikian, realitas menunjukkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20% (Kuncoro, 2007). Ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Tabel 3. Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten/Kota Bengkulu menurut Sumbernya Tahun 2009-2013 dalam Ribuan Rupiah.

KABUPATEN /KOTA	Rasio PAD terhadap APBD (%PAD/APBD)					Rata-Rata (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bengkulu Selatan	2,91	2,32	1,55	1,72	1,52	2,00
Rejang Lebong	2,05	1,74	1,79	2,38	3,01	2,19
Bengkulu Utara	1,49	2,43	1,53	1,86	2,18	1,90
Kaur	1,49	0,96	0,94	1,14	1,11	1,13
Seluma	0,88	0,81	0,82	1,19	1,60	1,06
Muko-muko	1,17	1,12	1,18	1,01	1,77	1,25
Lebong	1,22	0,97	1,03	0,98	1,42	1,12
Kepahiang	1,57	1,27	1,51	1,68	1,77	1,56
Bengkulu Tengah	1,12	0,54	0,46	0,71	0,92	0,75
Kota Bengkulu	2,76	2,47	3,26	3,16	3,61	3,05

Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS.Data diolah

Tabel 3 memperlihatkan rata-rata rasio Pendapatan Asli Daerah dengan APBD dalam periode 2009 - 2013 setiap Kabupaten/Kota di Bengkulu berbeda. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terbesar yaitu Kota Bengkulu sebesar 3,05 persen hal ini dikarenakan Kota Bengkulu merupakan ibukota Provinsi Bengkulu

dimana banyak sumber-sumber pendapatan yang bisa menghasilkan pendapatan asli daerah, satu diantaranya yaitu dari sektor pajak. Sehingga membuat PAD yang dihasilkan lebih besar dibandingkan daerah kabupaten lainnya. Kemudian diikuti oleh Kabupaten Rejang Lebong sebesar 2,19 persen. Proporsi PAD terendah dimiliki Kabupaten Bengkulu Tengah yaitu sebesar 0,75 persen, hal ini dikarenakan Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kabupaten pemekaran sehingga pemerintah hanya mendapatkan sedikit pajak yang dapat diandalkan dan juga belum bisa mengoptimalkan potensi-potensi yang ada.

Kemampuan Keuangan Daerah Derajat Otonomi Fiskal

Derajat Otonomi Fiskal dilihat dari perbandingan PAD dengan Total Pendapatan Daerah (TPD). Rasio ini menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah. Semakin tinggi kontribusi PAD maka semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. dapat disimpulkan bahwa PAD merupakan aspek yang sangat menentukan keberhasilan suatu daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Semakin tinggi PAD maka semakin besar kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu dilakukanlah perhitungan DOF untuk daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu periode 2009 – 2013.

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa DOF Kabupaten/Kota di Bengkulu tahun 2009-2013 relatif sangat rendah yaitu kurang dari 10, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu untuk membiayai belanja pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan masih dalam kategori sangat kurang.

Tabel 5 Derajat Otonomi Fiskal Kabupaten/Kota di Bengkulu tahun 2009 -2013

KABUPATEN /KOTA	Derajat Otonomi Fiskal (DOF)					Rata-Rata (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bengkulu Selatan	6,00	4,65	3,11	3,37	3,12	4,05
Rejang Lebong	4,15	3,50	3,56	4,72	5,84	4,35
Bengkulu Utara	2,95	5,01	2,90	3,86	4,37	3,82
Kaur	3,08	1,91	1,86	1,82	2,26	2,19
Seluma	1,73	1,68	1,25	2,20	3,17	2,01
Muko-muko	2,34	2,11	2,23	2,02	3,59	2,45
Lebong	2,47	1,96	2,00	1,93	2,80	2,23
Kepahiang	3,28	2,54	2,95	3,24	3,44	3,09
Bengkulu Tengah	2,24	1,09	0,97	1,42	1,83	1,51
Kota Bengkulu	5,66	4,98	6,43	6,15	7,05	6,05

Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS.Data diolah

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Perhitungan terhadap variabel penentu kemampuan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Tabel 6. Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu tahun 2009 - 2013

KABUPATEN /KOTA	Ketergantungan Keuangan Daerah					Rata-Rata (%)
	2009	2010	2011	2012	2013	
Bengkulu Selatan	92,33	86,50	80,79	82,86	84,85	85,46
Rejang Lebong	82,71	78,88	78,81	85,56	82,48	81,69
Bengkulu Utara	91,18	90,04	71,13	84,83	83,44	84,13
Kaur	94,54	89,60	84,80	86,00	89,39	88,87
Seluma	93,29	91,11	78,91	87,99	86,15	87,49
Muko-muko	82,86	79,02	82,69	89,16	88,05	84,36
Lebong	94,38	85,65	79,18	94,72	83,25	87,44
Kepahiang	80,58	76,41	77,65	87,16	86,91	81,74
Bengkulu Tengah	85,12	95,12	84,39	88,60	88,92	88,43
Kota Bengkulu	88,45	76,04	74,55	80,75	77,38	79,43

Sumber : Bengkulu Dalam Angka.2010-2014.BPS.Data diolah

Dilihat dari tabel 6. semua daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu tahun 2009-2013 masuk ke dalam kategori sangat tinggi yaitu lebih dari 50, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten/Kota di Bengkulu tingkat ketergantungannya pada pemerintah pusat masih sangat tinggi.

PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan menggunakan program Eviews 9.0. Untuk menganalisis pengaruh variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu. Persamaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : $BD = 1.197 + 1.954*DAK + 0.407*DAU + 7.859*PAD$

Secara parsial temuan penelitian menunjukkan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. DAK diberikan dengan tujuan untuk membiayai kegiatan -kegiatan khusus pada daerah tertentu yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan daerah. Secara statistik signifikan pada $\alpha=0.05$. Dalam DAK memiliki kontribusi positif terhadap Belanja Daerah sebesar Rp. 1,954. Artinya bila DAK meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp. 1,954. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu dan konsisten dengan penelitian Halim (2003) yang menegaskan bahwa transfer pemerintah pusat berpengaruh terhadap belanja daerah.

Demikian pula DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah dan secara statistik signifikan pada $\alpha=0.05$. Dalam pernyataan lain dapat dikatakan bahwa DAU memiliki kontribusi positif terhadap Belanja Daerah sebesar Rp. 0,407. Hal ini menunjukkan bahwa bila DAU meningkat Rp. 1 maka Belanja Daerah meningkat Rp. 0,407. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku belanja daerah dipengaruhi oleh DAU dan DAK. Dilihat dari hasil perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah, tingkat kemandirian pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu dalam membiayai pembangunan di daerah terutama untuk belanja daerah masuk dalam kategori sangat tinggi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat yaitu rata-rata sebesar 84,90 %. Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu, dan konsisten dengan penelitian Halim (2003) Pengaruh DAU dan DAK yang signifikan tersebut menunjukkan alokasi belanja modal pemerintah daerah kabupaten/kota sangat tergantung pada besar kecilnya alokasi dana perimbangan atau transfer oleh pemerintah pusat terutama DAU. Prakoso (2004) dalam Adi dan Harianto (2007), memperoleh temuan empiris yang sama bahwa jumlah belanja modal dipengaruhi oleh dana alokasi umum yang diterima dari Pemerintah Pusat.

Temuan lainnya menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu dan secara statistik signifikan pada $\alpha= 0.05$. Dalam pernyataan lain dapat dinyatakan bahwa bila PAD meningkat Rp. 1, maka Belanja Daerah juga ikut meningkat Rp. 7,859. Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendanaan belanja bagi pemerintah daerah disamping sumber-sumber pendapatan yang lain. Dapat dikatakan pula bahwa dalam manajemen pengeluaran Kabupaten/Kota di Bengkulu yang tercermin dalam APBD, PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang turut menentukan besar kecilnya Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu. Akan tetapi proporsi PAD dalam APBD tahun 2009-2013 masih sangat kecil yang rata-ratanya hanya sebesar 1,601 % untuk Kabupaten/Kota di Bengkulu. Kemampuan keuangan daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu untuk membiayai belanja pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan juga masih dalam kategori sangat rendah bila dilihat dari hasil perhitungan Derajat Otonomi Fiskal (DOF). Temuan ini mendukung hipotesis penelitian yang menyatakan PAD berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu, dan konsisten dengan temuan penelitian Mulyadi dkk (2010) menyatakan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu. Pada uji statistik juga menunjukkan nilai t-statistik variabel bebas PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah.

Sedangkan nilai konstanta sebesar Rp. 1,197 artinya bahwa jika variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah tidak mengalami perubahan atau dianggap nol, maka Belanja Daerah yang terjadi adalah sebesar Rp. 1,197. Belanja daerah terbagi atas dua kelompok besar yaitu Pertama, Dana Perimbangan yang merupakan pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Kedua, Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian merupakan pengeluaran/alokasi anggaran untuk pemerintah daerah berupa dana otonomi khusus dan dana

penyesuaian yang ditujukan untuk keperluan pemerintah daerah. Hal ini menjelaskan bahwa ada faktor lain diluar variabel DAK, DAU, dan PAD yang menyebabkan Belanja Daerah naik sebesar Rp. 1,197.

KESIMPULAN

Dari hasil perhitungan regresi data panel yang telah dilakukan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap Belanja Daerah Kabupaten /Kota di Bengkulu. Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Bengkulu berdasarkan hasil koefisien regresi masing masing adalah 1,954, 0,407, dan 7,859.

Untuk Uji-t dengan *Level of Significant* (α) = 0,05 diperoleh hasil bahwa variabel Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah, artinya peningkatan Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Pendapatan Asli Daerah akan meningkatkan Belanja Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Bangun, Andrias, 2009. *Pengaruh Partisipasi dalam Penyusunan Anggaran Kejelasan Sasaran Anggaran dan Struktur Desentralisasi terhadap Kinerja Manajerial SKPD dengan Pengawasan Internal sebagai Variabel Pemoderasi* (Studi Kasus Pada Pemerintahan Deli Serdang), Thesis UNSUT Medan.
- BPS. 2009. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu.
- BPS. 2010. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu.
- BPS. 2011. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu.
- BPS. 2012. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu.
- BPS. 2013. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu.
- BPS. 2014. Bengkulu Dalam Angka. Bengkulu.
- BPS. 2014. Lebong Dalam Angka. Bengkulu.
- Halim, 2002. "Akuntansi sector public: Akuntansi Keuangan Daerah". Salemba Empat, Jakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. (2007). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang* edisi ke-2. Jakarta: Erlangga.
- Mulyadi, dkk. 2010. "Analisis Pengaruh DAU dan PAD Terhadap Belanja Daerah Kabupaten / Kota Di Bengkulu". *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*, 3 (1), 51-57. Bengkulu: Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu.
- Republik Indonesia, 2000, *Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2004, *Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2005, *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*, Pustaka Pergaulan, Jakarta.
- Republik Indonesia, 2006, *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal & Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Siswanto Adrianus Dwi : Analisis Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal Terhadap Derajat Otonomi Pemerintah Propinsi di Indonesia. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* Volume 12 No. 1 Maret 2008.
- Sumaryadi, I Nyoman. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama.